

No. 205 Maret 2023

www.baktinews.bakti.or.id

BaktiNews

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**JANGAN SEPELEKAN HOAX DAN MISINFORMASI
MENGENAI KESEHATAN!**

DAUR ULANG UNTUK KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

**PAREPARE DAN LAYANAN
KEWILAYAHAN**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTInews

Maret 2023

No. 205

- 1** Jangan Sepelekan Hoax dan Misinformasi Mengenai Kesehatan!
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 7** Manajemen Kebersihan Menstruasi: Tanggung Jawab Siapa?
Oleh **WIWIN PURBANINGRUM, REZANTI PUTRI PRAMANA, SILVIA DEVINA, RIKA KULAMASARI**
- 11** Memetakan Potensi Aktor dalam Perilaku Bullying
Oleh **YUSRI**
- 16** Desain Sosial untuk Pengembangan Mata Pencarian dan Penghidupan
Oleh **TIRZA THEORUPUN**
- 19** Ragam Disabilitas
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 23** Daur Ulang untuk Kehidupan Berkelanjutan
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 27** Parepare dan Layanan Kewilayahan
Oleh **ABDUL MADJID SALLATU**
- 31** Memberantas Kemiskinan Ekstrem: Konvergensi Program Berbasis Sasaran (Bagian 1)
Oleh **AGUSSALIM**
- 36** Menjadi Fasil
Oleh **DANI WAHYU MUNGGORO**
- 37** Peran Pemda dalam Menjamin Hak Warga Menghirup Udara Bersih
Oleh **FINASTRI ANNISA**
- 40** Diskusi IG Live Story @infobakti dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI



JANGAN SEPELEKAN HOAX & MISINFORMASI MENGENAI KESEHATAN!

Oleh **HALIA ASRIYANI**

“Jangan minum air dingin usai makan agar tidak kena penyakit jantung.”

“Vaksin HPV menyebabkan menopause dini.”

“Cek gula darah gratis sebabkan penularan virus HIV.”

D

emikianlah sejumlah informasi hoaks mengenai kesehatan. Di era digital saat ini, di mana akses untuk terhubung ke internet kian mudah, masyarakat akan semakin mudah pula terpapar berbagai informasi. berdasarkan laporan Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII. Belum lama ini, menyebutkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai mencapai 210.026.769 jiwa atau setara dengan 77,02% dari total populasi Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, angka penetrasi internet sendiri adalah 75,05%.





Hoaks secara umum adalah informasi yang tidak benar dalam bentuk pemutarbalikan fakta, pengaburan informasi, ataupun penyampaian informasi palsu

Foto: Ihsan Djumaed/ Yayasan BaKTI

Sementara itu, angka penetrasi internet berdasarkan demografi menunjukkan bahwa pengguna internet terbanyak adalah masyarakat di rentang usia 13-18 tahun yaitu 99,16%, disusul masyarakat usia 19-34 tahun sebanyak 98,64%. Konten internet yang paling sering diakses sendiri adalah media sosial sebanyak 89,15%. Berdasarkan data-data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar sangat dekat dengan internet dan mengakses konten di media sosial mereka setiap hari. Dengan begitu, kemungkinan masyarakat terpapar hoaks dan misinformasi pun sangat besar. Hoaks secara umum adalah informasi yang tidak benar dalam bentuk pemutarbalikan fakta, pengaburan informasi, ataupun penyampaian informasi palsu. Sedangkan misinformasi adalah informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya mempercayai bahwa itu benar, sehingga terus menyebarkan informasi tersebut.

Sebuah survei yang dilakukan oleh tim literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap informasi bahwa 82,8% alasan masyarakat Indonesia menggunakan media sosial adalah untuk membantu dalam komunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup terbiasa berinteraksi di ranah maya dengan bantuan media sosial. Meskipun begitu, era digital juga menghadirkan problematika tersendiri terkait banjirnya arus informasi yang terlalu mudah mengalir. Dari ratusan hingga ribuan informasi yang diterima oleh seseorang setiap harinya, selalu ada saja kemungkinan bahwa informasi tersebut merupakan suatu kesalahan. Bukan hanya informasi politik, salah satu sasaran utama hoaks juga adalah informasi kesehatan. Hal ini karena kesehatan menyangkut unsur mendasar kehidupan dan sangat mudah untuk menimbulkan pesan yang tak jarang bersifat provokatif.

Kenapa Hoaks dan Misinformasi Mudah Menyebar?

Jika saat ini kita dengan mudah memperoleh informasi melalui gawai dengan membuka kanal berita *online*, media sosial, maupun sebaran informasi di grup-grup pertemanan, maka semudah itu pulalah sebuah informasi hoaks dapat menyebar. Menyebarnya hoaks dan misinformasi bisa disebabkan sejumlah hal. Biasanya seseorang menyebarkan informasi karena ingin mendapatkan perhatian, yaitu menjadi yang pertama membagikan sehingga orang lain akan merujuk dirinya. Alasan inilah yang sering menyebabkan seseorang tidak mengecek ulang sebelum menyebarkan. Alasan lainnya adalah secara emosional terpancing sehingga tanpa berpikir panjang segera meneruskan. Terdapat pula alasan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar dengan maksud politik, ekonomi, atau menimbulkan keresahan. Bahkan mungkin untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Sedangkan mengenai informasi kesehatan, sebenarnya seseorang sering menyebarkan dengan maksud baik, yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi sekitarnya. Namun, tanpa disadarinya ternyata informasi tersebut tidak benar.

Hal ini dipicu perkembangan literasi digital masyarakat tidak seiring dengan arus perkembangan teknologi yang sangat pesat. Literasi digital tidak dapat dipisahkan dari dunia media sosial karena sebagian besar orang Indonesia mengakses akun media sosial saat menggunakan internet. Dalam menggunakan media sosial, tidak semua orang menggunakannya dengan bijak karena merasa berhak untuk bebas berpendapat. Pada akhirnya, muncul kasus-kasus kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

Kebebasan berpendapat sendiri dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 28E UUD 1945 mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Kebebasan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kebebasan berpendapat dan

berekspresi. Pada kebebasan berpendapat, individu berhak menyampaikan opininya melalui ucapan, tulisan, atau lain sebagainya. Sedangkan kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk melalui materi audiovisual, ekspresi budaya (tarian dan lagu), artistik maupun politik, serta gerakan lainnya melalui tagar dan aksi sosial. Semua ini menjadi lebih mudah dilakukan dengan perantara media sosial.

Meski demikian, penggunaan media sosial sebagai kanal kebebasan berpendapat tetap diasosiasikan pada keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, media sosial dapat dilihat sebagai satu langkah lebih dekat dengan demokrasi pada internet, dan menutup kesenjangan digital antara negara berkembang dan negara maju karena akses pada informasi yang memadai. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi kanal penyebaran hoaks dan misinformasi yang sangat masif. Karena itu, semua orang perlu menyadari bahwa hak kebebasan tersebut tidak absolut karena diiringi oleh tanggung jawab. Setiap orang memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka sebar di media sosial. Tak terkecuali informasi kesehatan yang mungkin kita anggap sebagai informasi penting untuk segera disebar. Jadi tunggu dulu, tahan sebentar jempolmu! Karena hoaks dan misinformasi kesehatan punya efek yang cukup serius bagi masyarakat.

Dampak Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Asosiasi Penyedia Jasa Internet merilis melalui Profil Internet Indonesia pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa informasi layanan kesehatan di internet merupakan kategori konten yang paling banyak dikunjungi atau diminati oleh masyarakat yaitu di angka 26,11 %. Dibandingkan dengan layanan hukum maupun administrasi kependudukan yang masing-masing di angka 4,72% dan 15,29%. Dengan begitu, kemungkinan masyarakat untuk terpapar hoaks dan misinformasi kesehatan menjadi sangat besar. Terlebih lagi pada masa pandemi ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa mulai tahun 2020, terdapat sejumlah 2.217 hoaks terkait COVID-19 dan telah beredar lebih dari 6.000 kali di media sosial.

Terdapat sejumlah bentuk berita hoaks dan misinformasi kesehatan yang paling sering ditemui. **Pertama**, informasi mengenai pengobatan alternatif yang bermanfaat bagi kesehatan (misalnya memijat telapak kaki dapat mengobati penyakit saraf); **Kedua**, berupa larangan terhadap sesuatu karena berdampak pada kesehatan (misalnya larangan untuk mengonsumsi MSG karena berbahaya untuk otak); **Ketiga**, informasi mengenai larangan untuk mengonsumsi sesuatu secara bersamaan (misalnya larangan untuk mengonsumsi mie instan dan coklat secara bersamaan yang dapat menyebabkan keracunan); **Keempat** yaitu informasi mengenai manfaat obat herbal (misalnya daun sirsak dapat mengobati kanker).

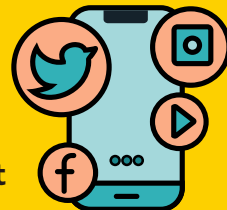
Sementara itu, dampak hoaks dan misinformasi di dunia kesehatan tidak dapat dianggap sepele. Banyak sekali info yang tidak benar tentang kesehatan menyebar tanpa terkendali dan bahkan informasi itulah yang dipercaya oleh masyarakat. Tersebar nya informasi tidak benar mengenai kesehatan ini menyebabkan timbulnya kekeliruan asumsi di masyarakat sehingga justru membahayakan bagi kesehatan. Bahkan tidak sedikit masyarakat menjadi korban karena sebaran hoaks dan misinformasi kesehatan yang mereka terima.

Hoaks dan misinformasi kesehatan ini bukan hanya berdampak bagi masyarakat yang terpapar informasi, melainkan juga bagi tenaga maupun layanan kesehatan secara umum. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada tenaga dan layanan kesehatan merupakan salah satu dampak dari hoaks dan misinformasi kesehatan ini. Masyarakat menjadi percaya atas informasi kesehatan yang disampaikan oleh orang lain ketimbang tenaga kesehatan. Masyarakat pun jadi enggan untuk datang ke layanan kesehatan, bahkan cenderung tidak mencari informasi pada tenaga kesehatan. Akibatnya, cakupan kesehatan masyarakat sulit dicapai dengan maksimal.



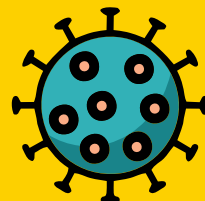
210.026.769 Jiwa
atau **77,02%** total
populasi Indonesia
adalah pengguna
internet

89,15% Masyarakat
mengakses akun
media sosial saat
menggunakan internet



Pengguna internet
terbanyak adalah
anak muda usia
13-18 tahun dengan
tingkat penetrasi
99,16%

2.217 hoaks
terkait COVID-19
beredar lebih dari
6.000 kali di media
sosial di masa
pandemi



Kategori konten
terbanyak dikunjungi
masyarakat adalah
**informasi layanan
kesehatan (26,11 %)**

Sumber: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Bagaimana Menghadapi Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Menghadapi hoaks dan misinformasi di tengah badai informasi dan teknologi ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital diartikan sebagai kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi digital memiliki arti penting dalam kehidupan komunikasi karena tiga alasan. **Pertama**, penggunaan media digital khususnya internet dan media sosial yang semakin intens dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya, gawai menjadi perangkat yang tidak boleh tertinggal serta menjadi media yang paling diandalkan sebagai sarana berkomunikasi serta mencari informasi. Media digital berkembang dengan sangat cepat,

dengan tawaran informasi dan konten lainnya yang terus menerus diproduksi tanpa mengenal batasan jarak dan waktu. Pembaharuan informasi bahkan terjadi dalam hitungan detik, dari banyak sumber dan platform yang tersedia.

Kedua, ketergantungan masyarakat terhadap situs mesin pencari dan platform media sosial untuk mencari informasi. Tampaknya, internet menjadi media baru yang menawarkan solusi atas segala pencarian informasi masyarakat. Internet menjadi unggul karena waktu penyediaan informasi yang cepat dan kemudahan aksesnya. Demikian halnya dengan media sosial sebagai kanal akses informasi alternatif.

Ketiga, untuk menyeleksi informasi dari banyaknya sumber yang ada, individu memerlukan kecakapan atau kemampuan spesifik. Dengan tersedianya aneka jenis informasi, perlu adanya kecakapan khusus yang ditunjang dengan literasi digital. Dengan memiliki kecakapan tersebut, individu akan memiliki kontrol lebih pada proses interpretasi pesan sehingga dapat menyeleksi informasi atau konten tertentu dengan akurat.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Program SBC (*Social Behaviour Change*) Kerja Sama UNICEF dan Yayasan BaKTI untuk Menanggulangi Hoaks dan Misinformasi Kesehatan

Program SBC kerja sama UNICEF-Yayasan BaKTI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berfokus pada penanggulangan hoaks dan misinformasi kesehatan melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Program yang akan berlangsung pada Januari-Mei 2023 ini dijalankan di empat wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Bone dan Wajo.

Sejumlah tenaga kesehatan, kader masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat dan kaum muda akan dilatih meningkatkan kemampuan literasi digital mereka dalam menghadapi hoaks dan misinformasi kesehatan. Di samping itu, para peserta juga akan memperoleh peningkatan kapasitas mengenai KAP (Komunikasi Antar Pribadi) agar pengetahuan yang diperoleh dapat dibagikan kepada masyarakat di sekitar mereka. Harapannya dengan upaya ini, kemampuan literasi digital masyarakat

bisa meningkat dan capaian kesehatan masyarakat ikut meningkat pula.

Program ini hadir berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas. Upaya penanggulangan hoaks dan misinformasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Ada banyak sekali faktor yang harus ditanggulangi, mulai dari penggunaan teknologi, akses kanal dan informasi, hingga pengguna informasi itu sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh program SBC kerja sama UNICEF-Yayasan BaKTI ini sendiri pun bukanlah hal yang baru, upaya yang sama tentu telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, proses pembelajaran secara terus menerus sangat dibutuhkan dalam hal ini. Upaya penanggulangan hoaks dan misinformasi harus terus berjalan, seiring perjalanan kemajuan teknologi dan era digital yang kian pesat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja sama Yayasan BaKTI-UNICEF dapat menghubungi info@bakti.or.id



MANAJEMEN KEBERSIHAN MENSTRUASI: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Oleh

**WIWIN PURBANINGRUM, REZANTI PUTRI PRAMANA,
SILVIA DEVINA, RIKA KULAMASARI**

Kaget, takut ... langsung nangis, kirain kenapa-napa”. Itulah yang dirasakan Nadia¹, siswa kelas 6 SD di DKI Jakarta ketika melihat ada darah yang menempel di celananya. Nadia tidak sendiri. Saat pertama kali mengalami menstruasi, 70 dari 75 siswa yang kami wawancarai mengaku memiliki perasaan kurang nyaman, takut, kaget, bingung, menngis, bahkan berteriak-teriak memanggil ibunya.

Pada kasus lain, terhitung sudah lima kali Nita² pulang sekolah lebih awal. Pembalut terasa sudah penuh, darah menstruasi menembus pakaian, dan mendapatkan hari pertama

menstruasi di sekolah merupakan beberapa alasan yang menyebabkan Nita pulang cepat. Nita tidak membawa pembalut cadangan ke sekolah karena khawatir diejek oleh teman laki-laki yang sering membuka tas siswa perempuan tanpa izin untuk meminjam sesuatu.

Cerita lainnya datang dari Aster³. Aster juga memilih untuk tidak mengganti pembalut di sekolah karena toilet kotor dan pintunya rusak.

Menstruasi adalah hal normal bagi perempuan. Namun, menstruasi bisa menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan jika remaja perempuan tidak dipersiapkan untuk menjalaninya dan lingkungan sekitarnya tidak memberikan dukungan.

Memenuhi Kebutuhan Menstruasi Sama dengan Memenuhi Hak Perempuan

Kesehatan menstruasi memiliki peran dalam menentukan kualitas hidup perempuan karena berpotensi memengaruhi kesehatan (reproduksi dan kehamilan), partisipasi pendidikan, bahkan dalam jangka panjang juga memengaruhi partisipasi kerja mereka. Pemenuhan hak kesehatan dan kebersihan menstruasi remaja perempuan juga berarti menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Saat menstruasi, perempuan perlu mengelola kebersihannya, yakni mengganti pembalut setiap empat jam, mencuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah mengganti pembalut, dan membungkus pembalut dengan plastik/kertas bekas sebelum dibuang ke tempat sampah. Tak hanya itu, mereka juga perlu tahu tentang siklus reproduksi; perubahan fisik, hormonal dan emosional yang terjadi; dan mengelola kondisi biologis (sakit menstruasi) dan psikologisnya saat menstruasi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak kebersihan menstruasi perempuan, diperlukan intervensi holistik yang berbasis hak. Pemenuhan hak atas sarana air dan sanitasi layak saja tidak cukup. Agar dapat menjalani menstruasi dengan nyaman, diperlukan pemenuhan hak perempuan (terutama remaja) atas informasi untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi

menstruasi. Membentuk sikap teman sebaya, terutama teman laki-laki, juga diperlukan agar remaja perempuan yang sedang menstruasi tidak lagi menjadi objek perundungan. Perlu tercipta juga norma masyarakat yang tidak lagi menganggap 'tabu' pembicaraan mengenai menstruasi, sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan kepada remaja perempuan dapat terjadi dengan baik. Pandangan bahwa menstruasi adalah kotor dan larangan-larangan terkait menstruasi, seperti larangan masuk kebun di Nusa Tenggara Timur (NTT), juga perlu diintervensi karena mendiskriminasi perempuan di ruang publik.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terkait pengalaman remaja dalam menghadapi menstruasi di tiga kabupaten/kota di Indonesia, pemenuhan kebutuhan kesehatan menstruasi secara holistik masih belum terlihat. Edukasi dari orang tua, guru, dan tenaga kesehatan kepada remaja perempuan belum terlaksana dengan baik, dan siswa laki-laki masih suka mengejek teman perempuan yang sedang haid. Di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT, menstruasi masih dianggap kotor dan tabu untuk dibicarakan, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Misalnya, ada guru yang tidak mengajarkan materi pelajaran IPA terkait alat reproduksi di kelas. Tindakan ini pun mendapat restu dari kepala sekolah. Pihak yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan untuk belajar, justru bungkam dan menganggap hal ini 'wajar' untuk tidak diajarkan.

Jika membicarakan menstruasi saja masih diwarnai oleh tabu, bagaimana anak perempuan bisa siap menghadapi menstruasi yang akan datang di usia belia?

Intervensi Untuk Mendukung Praktik Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Remaja Perempuan

Melihat kenyataan bahwa isu MKM belum mendapatkan perhatian khusus, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) berusaha menjembatani tantangan pengelolaan kebersihan menstruasi yang dihadapi remaja perempuan dengan merancang intervensi yang holistik. Intervensi ini tidak hanya dengan

membangun infrastruktur toilet yang aman dan nyaman, tetapi juga membangun dukungan dari lingkungan sekitar melalui edukasi kepada berbagai pihak. Toilet yang dibangun Plan Indonesia dinamai 'toilet MKM' yang di dalamnya dilengkapi tempat sampah, sabun cuci tangan, pembalut cadangan, dan rok cadangan.

Dalam membangun dukungan lingkungan, bentuk intervensi yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia beragam tergantung audiensnya. Bagi tenaga kesehatan di tingkat kabupaten, proses edukasi diawali dengan pelaksanaan *training of trainer* (ToT) terkait MKM. Di beberapa wilayah, lokakarya ini juga dihadiri perwakilan guru dan siswa. Di tingkat sekolah, edukasi MKM dilakukan dalam bentuk lokakarya yang dihadiri guru, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua. Lokakarya ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya dukungan orang-orang di sekitar remaja perempuan untuk membantu mereka menghadapi menstruasi dan menjaga kebersihan menstruasi.

Untuk menarik perhatian para siswa, termasuk siswa laki-laki, bentuk sosialisasi dibuat lebih menarik dengan memanfaatkan media seni pementasan teater/lenong. Topik yang diangkat dalam pementasan drama ini meliputi penjelasan tentang menstruasi, cara menjaga kebersihan selama menstruasi, dan larangan mengganggu siswa perempuan yang sedang menstruasi. Dengan strategi edukasi seperti ini, informasi yang sensitif diharapkan dapat menjadi lebih mudah dipahami.

Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik?

Kami menemukan bahwa program intervensi terkait isu MKM, seperti yang dilakukan oleh Plan Indonesia, memiliki dampak positif. Di beberapa sekolah intervensi, kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa perempuan dan bahkan siswa laki-laki sudah lebih terbuka untuk membicarakan topik menstruasi. Selain itu, keberadaan toilet yang aman, aksesibel, dan nyaman membuat remaja perempuan mau mengganti pembalut di sekolah dan tidak lagi pulang ke rumah. Implikasinya, kehadiran siswa perempuan di sekolah intervensi lebih baik

dibandingkan siswa di sekolah yang tidak mendapat intervensi pembangunan toilet. Secara tidak langsung, program intervensi ini mendukung pemenuhan hak remaja perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Meski dampak positif dari program intervensi sudah terlihat, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih adanya anggapan beberapa orang tua yang tidak merasa perlu memberikan informasi seputar menstruasi kepada anak laki-lakinya. Padahal, sikap negatif siswa laki-laki, misalnya melalui perundungan, dapat memengaruhi siswa perempuan dalam melakukan praktik MKM.

Selain itu, orang dewasa di lingkungan siswa perempuan, termasuk guru dan orang tua, masih belum menerapkan praktik MKM yang baik, seperti dalam aspek frekuensi penggantian pembalut dan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Bagaimana mungkin mereka dapat memberikan edukasi yang memadai jika mereka sendiri, yang merupakan sumber informasi pertama dan utama MKM bagi remaja, masih belum mempraktikkan kebersihan menstruasi dengan baik?

Selanjutnya, ketika intervensi hanya dapat dilakukan dalam waktu terbatas, *exit strategy* menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan program meski setelah intervensi selesai dilakukan. Dalam studi ini, strategi keluar yang perlu didorong adalah memastikan pihak di sekitar remaja perempuan mengambil langkah berkelanjutan untuk melakukan edukasi terkait MKM. Di sekolah intervensi, belum ditemukan kebijakan sekolah untuk meneruskan pemberian informasi MKM kepada siswa perempuan setelah program Plan Indonesia berakhir. Tenaga kesehatan juga tidak melanjutkan pelaksanaan sosialisasi MKM ke sekolah-sekolah.

Terakhir, siswa perempuan di sekolah intervensi belum mempraktikkan seluruh aspek MKM dengan baik, termasuk masih menggunakan pembalut dalam durasi panjang (tidak diganti setiap 4 jam) dan jarang mempraktikkan cuci tangan dengan sabun sebelum mengganti

pembalut. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis informasi yang dilaksanakan hanya satu kali, seperti melalui pementasan drama, belum berdampak langsung pada perubahan perilaku remaja. Kepercayaan dan kebudayaan yang memandang menstruasi secara negatif juga menjadi faktor penghambat remaja mengetahui dan melakukan MKM.

Apayang Perlu Kita Lakukan Ke Depannya?

Program Plan Indonesia membuka mata kita bahwa banyak remaja perempuan belum siap menghadapi menstruasi dan mendukung mereka merupakan kewajiban kita semua, meski terdapat ruang perbaikan yang perlu dilakukan.

Pemangku kepentingan dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terbangunnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Dengan begitu, siswa perempuan berhak mendapatkan lingkungan sekolah yang bisa memastikan terpenuhinya praktik MKM. Dalam merancang intervensi untuk meningkatkan praktik MKM, penting juga untuk melihat keragaman kondisi remaja perempuan, seperti remaja dengan disabilitas atau remaja dari kelompok kesejahteraan tertentu yang memengaruhi praktik MKM. Dengan demikian, intervensi yang dirancang dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan remaja perempuan.

Khusus menyoroti ketersediaan toilet, meski sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Namun masih ada pertanyaan apakah toilet yang disediakan sudah memenuhi standar. Studi kami menemukan bahwa di beberapa sekolah, toilet dalam keadaan memprihatinkan. Kondisi sekolah seperti ini menggambarkan tidak adanya perhatian khusus untuk isu MKM dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat, khususnya sekolah, bahwa isu ini berdampak besar pada pemenuhan hak belajar remaja perempuan.

Edukasi kepada guru dan orang tua, yang merupakan sumber informasi pertama dan utama remaja terkait menstruasi, perlu diarahkan agar mendorong mereka mempraktikkan MKM dengan baik dan menciptakan cara pandang dan perilaku yang lebih positif terhadap menstruasi.

Hal kecil yang dapat dilakukan sekolah tetapi sangat berharga bagi siswa perempuan adalah tersedianya toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan; memastikan siswa laki-laki dan guru laki-laki tidak menggunakan toilet perempuan; memastikan semua infrastruktur toilet dapat diakses orang dengan disabilitas; tersedianya air bersih dan sabun; adanya tempat sampah serta plastik/kertas untuk membungkus pembalut di dalam toilet; serta tersedianya seragam, pembalut cadangan, dan celana dalam ganti minimal di ruang UKS. Bagaimana dengan peran kita? Mari tengok kiri kanan. Remaja putri di sekitar kita seringkali memiliki segudang pertanyaan yang belum terjawab.

Kenapa menstruasi bisa tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang? Kenapa siklus menstruasi ada yang tidak teratur? Bagaimana cara menggunakan pembalut supaya tidak bocor? Berapa kali harus mengganti pembalut? Apakah perempuan yang sedang menstruasi bisa hamil jika duduk berdekatan dengan teman laki-laki?

Bantu mereka untuk tahu dan mampu menghadapi menstruasi dengan baik. Kegelisahan dan ketakutan remaja terkait menstruasi yang diperparah oleh ejekan teman laki-laki layak untuk dianggap penting dan segera diatasi. Ini adalah saatnya bagi orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah, dan kita semua untuk membuat remaja perempuan, apa pun kondisi dan latar belakangnya, siap dan mampu mengelola kebersihan menstruasinya dengan baik. Memahami isu MKM sebagai tanggung jawab bersama berarti kita berada satu langkah lebih maju dalam kesetaraan pemenuhan hak perempuan atas kesehatan dan pendidikan.

1,2,3 Nama samaran

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://smeru.or.id/id/article-id/manajemen-kebersihan-menstruasi-tanggung-jawab-siapa>

MEMETAKAN POTENSI AKTOR DALAM PERILAKU *BULLYING*

Oleh **YUSRI**

Perbedaan Pandangan Mengenai Perilaku *Bullying*

Salah satu faktor penyebab sehingga perilaku *bullying* cenderung sulit untuk ditangani khususnya di tingkat satuan pendidikan adalah karena terdapat kecenderungan warga sekolah baik itu guru, siswa, kepala sekolah, ataupun tenaga kependidikan memiliki perbedaan pandangan mengenai apa itu *bullying* perilaku apa yang bisa dikategorikan sebagai perilaku *bullying*, dan apakah perilaku kekerasan sama dengan perilaku *bullying*. Perbedaan pandangan mengenai perilaku *bullying* akan menyebabkan ketidakkonsistenan dan ketidakadilan dalam menangani perilaku *bullying* di sekolah. Hal ini terjadi karena warga sekolah cenderung memiliki perbedaan persepsi mengenai perilaku *bullying* tersebut. Maka dari itu, sebelum berbicara mengenai metode atau strategi yang tepat untuk menangani perilaku *bullying*, semua warga sekolah termasuk orang tua harus memiliki pemahaman yang sama mengenai perilaku *bullying*.



Apa itu Perilaku *Bullying*?

Perilaku *bullying* atau perundungan dapat didefinisikan sebagai sebuah perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti ataupun mempermalukan orang tersebut. Perilaku *bullying* tentunya berbeda dengan perilaku kekerasan, karena termasuk dalam kategori perilaku kekerasan, tapi tidak semua perilaku kekerasan termasuk perilaku *bullying*.



Foto: Dok. Penulis

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengkategorikan perilaku ini termasuk perilaku *bullying* atau bukan. Pertama, perilaku tersebut termasuk perilaku agresif, dalam hal ini orang yang melakukan perilaku tersebut secara sengaja melakukan perilaku tersebut dengan niat menyakiti atau mempermalukan orang lain. Kedua, terdapat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan, dalam hal ini adalah orang yang melakukan perundungan memiliki kekuatan (*power*) atau kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan

orang yang dibuli. Kekuatan di sini seperti badannya lebih besar, atau dilakukan secara berkelompok, dan bisa juga bersifat lainnya seperti orang yang melakukan *bullying* memiliki latar belakang keluarga yang memiliki kekuasaan. Indikator ketiga adalah perilaku ini dilakukan berulang-ulang atau berpotensi dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, indikator ini yang sebaiknya dapat dipahami oleh guru dan warga sekolah lainnya sebelum mendesain strategi atau metode penanganan perilaku *bullying* di sekolah.



Foto: Dok. Penulis

Lingkaran *Bullying*

Berbicara mengenai perilaku *bullying*, tentunya bukan hanya tentang orang yang melakukan perundungan (pembuli) dan orang yang dirundung. Tapi terdapat berbagai aktor yang terlibat ketika terjadi perilaku perundungan. Hal ini tentunya penting untuk diidentifikasi oleh guru untuk mendesain penanganan yang tepat untuk mengatasi perilaku *bullying* di sekolah (lihat Box).

Mengapa Penting Memahami Lingkaran *Bullying*?

Lingkaran *bullying* penting untuk dipahami karena hal ini akan berkaitan dengan strategi penanganan yang akan dilakukan oleh guru atau pihak sekolah. Dalam menangani perilaku *bullying*, banyak guru cenderung hanya fokus pada siswa karakter A (Inisiator dari perilaku *bullying*), karakter B (Pengikut), dan karakter G (orang yang dirundung). Padahal banyak aktor lain yang juga harus diberikan penanganan dan pendekatan untuk dapat menangani dan menghentikan perilaku *bullying* yang terjadi.

Salah satu contoh sederhananya adalah ketika dalam satu kelas terjadi perilaku *bullying*, ada 2 siswa yang membuli seorang siswa, dan 30 siswa lainnya tertawa melihat perilaku tersebut. Terkadang, guru hanya fokus menghentikan 2 siswa yang membuli ini, namun tidak memberikan penegasan kepada 30 siswa yang tertawa ini. Siswa yang tertawa ini akan menganggap bahwa tertawa melihat perilaku *bullying* adalah hal wajar yang bisa dilakukan, karena guru tidak pernah memberikan penegasan atau menjelaskan bahwa perilaku tersebut tidak boleh dilakukan karena perilaku tersebut secara otomatis mendukung perilaku *bullying*. Maka dari itu, strategi yang dapat dilakukan guru adalah memastikan tidak ada siswa yang tersenyum dan tertawa ketika melihat perilaku *bullying*, sebaliknya guru dapat mendukung siswa agar mereka berani melaporkan perilaku *bullying*.

Selain itu, ketika terdapat siswa yang Karakter E dan F (pembela potensial dan pembela) yang telah memberanikan diri melaporkan perilaku *bullying*, banyak guru cenderung tidak memberikan *reward* atau penghargaan kepada siswa tersebut. Guru cenderung hanya fokus pada

Berikut adalah beberapa aktor yang terlibat ketika terjadi perilaku *bullying*:

1 KARAKTER A Inisiator dari perilaku *bullying* (Pembuli)

Karakter dari orang ini adalah siswa yang cenderung menjadi pemimpin di lingkarannya yang menjadi inisiator untuk melakukan perilaku perundungan.

2 KARAKTER B Pengikut

Siswa yang memiliki karakter ini cenderung melakukan perilaku perundungan namun hanya sekedar ikut-ikutan setelah siswa karakter A melakukan *bullying*. Siswa karakter B ini adalah mereka yang bukan memulai untuk melakukan *bullying*, namun setelah karakter A membuli, karakter B ini cenderung membesar-besarkan atau mendukung karakter A untuk merundung.

3 KARAKTER C Pembuli Pasif

Siswa yang memiliki karakter ini cenderung tidak melakukan perilaku *bullying* secara langsung, namun siswa ini cenderung tersenyum atau tertawa ketika melihat perilaku *bullying*. Tertawa atau tersenyum melihat perilaku *bullying* berarti kita setuju atau mendukung perilaku *bullying* tersebut

4 KARAKTER D Penonton (*Bystander*)

Bystander adalah karakter dimana siswa cenderung tidak mau terlibat ketika melihat perilaku *bullying*. Siswa ini tidak mendukung perilaku *bullying* tersebut tapi siswa ini juga tidak berusaha untuk membela atau menolong siswa yang dirundung. Siswa ini hanya fokus pada dirinya sendiri.

5 KARAKTER E Pembela Potensial

Siswa yang memiliki karakter ini cenderung tidak suka dengan perilaku *bullying*, namun siswa ini juga cenderung takut untuk membela temannya yang dirundung dan atau takut untuk melaporkan perilaku *bullying* tersebut ke guru atau orang dewasa lainnya.

6 KARAKTER F Pembela Aktif

Pembela aktif adalah siswa yang dengan berani membela temannya atau siswa lain yang dirundung atau berani melaporkan ke guru ketika melihat perilaku *bullying* di sekolah

7 KARAKTER G Orang yang dirundung (dibuli)

Siswa yang memiliki karakter ini adalah siswa yang cenderung sering dibully oleh teman-temannya di sekolah

perilaku negatif siswa, namun ketika ada siswa melakukan perilaku positif, tidak ada reward atau penghargaan yang diberikan kepada siswa tersebut. Padahal yang diinginkan sebenarnya adalah memperbanyak atau mendukung siswa di sekolah untuk melaporkan ketika melihat perilaku *bullying*.

Salah satu teori yang berkaitan kasus ini adalah Penguatan positif (*reinforcement Theory*). Skinner (2016) menjelaskan bahwa untuk mempertahankan ataupun meningkatkan perilaku positif siswa, maka perlu diberikan stimulus berupa penguatan positif. Penguatan positif adalah pemberian tanggapan positif ketika seorang individu menunjukkan perilaku positif yang dibutuhkan. Tanggapan positif dalam hal ini bisa dilakukan dalam bentuk ucapan terima kasih, mengatakan kamu hebat telah berani melaporkan perilaku *bullying*, atau berupa penghargaan lainnya. Maka dari itu, salah satu bentuk strategi untuk mengurangi ataupun menghentikan perilaku *bullying* di sekolah adalah dengan pemberian penguatan positif pada siswa yang Karakter E dan F, agar lebih banyak lagi siswa yang berani melaporkan ketika melihat perilaku *bullying*.

Selain beberapa karakter tersebut, guru juga harus fokus pada karakter A (Inisiator dari perilaku *bullying*). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki karakter A (Inisiator dari perilaku *bullying*) cenderung memiliki permasalahan di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakat, bahkan siswa ini cenderung merupakan korban perilaku *bullying* atau perilaku agresif lainnya di lingkungan rumahnya atau di lingkungan masyarakatnya. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Choi & Park (2018) yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan perundungan cenderung merupakan korban dari perilaku *bullying* di lingkungan sebelumnya atau di lingkungan lainnya. Perilaku *bullying* yang dilakukan di sekolah sebagai wujud pelampiasan, balas dendam, atau untuk

mencari perhatian. Hal yang bisa dipelajari dalam hal ini adalah siswa karakter A sesungguhnya membutuhkan dukungan dan bantuan dari guru. Maka dari itu, penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi dialami oleh siswa baik itu di lingkungan rumahnya maupun di lingkungan sosial maupun masyarakat, sehingga guru dapat memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan masalah yang dialami oleh siswa.

Program ROOTS Indonesia sebagai Program Pencegahan Perilaku *Bullying* yang bersifat Komprehensif

Program Roots Indonesia adalah program pencegahan perilaku *bullying* yang fokus memberdayakan peran siswa sebagai agen perubahan dalam menyebarkan dan memengaruhi siswa lain untuk berperilaku positif. Salah satu fokus dalam program Roots adalah dengan membiasakan dan memperbanyak perilaku positif, maka akan menghasilkan iklim budaya positif di sekolah dan hal tersebut dapat berpotensi mengurangi terjadinya perilaku *bullying* di sekolah.

Agen perubahan dalam hal ini tidaklah dipilih oleh guru atau kepala sekolah, tapi dinominasikan oleh siswa lain di sekolah tersebut. Setiap siswa di sekolah akan menominasikan 10 temannya yang paling sering berinteraksi dengan mereka atau yang paling sering menghabiskan waktu dengannya. 30-40 siswa yang paling banyak dinominasikan oleh temannya yang nantinya akan menjadi agen perubahan di sekolahnya. Model ini yang disebut sebagai teori jejaring sosial (Paluck dkk., 2016).

Siswa agen perubahan ini nantinya akan mengikuti 10-15 kali pertemuan dengan guru terlatih dengan menggunakan modul Roots yang telah diadaptasi dan dikembangkan oleh UNICEF Indonesia dan mitranya. Fokus pertemuan ini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan agen perubahan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan agen perubahan, memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku *Bullying*.

Serta bagaimana mengidentifikasi dan mengimplementasikan perilaku-perilaku positif

yang dapat dilakukan di sekolah, serta bagaimana memengaruhi siswa lain untuk berperilaku positif. Program Roots Indonesia boleh dikatakan sebagai sebuah strategi pencegahan perilaku *bullying* yang menjawab ataupun sesuai dengan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Program Roots Indonesia fokus memberikan pemahaman kepada siswa yang bertugas sebagai agen perubahan di awal pertemuan mengenai perilaku *bullying*. Hal itu dilakukan agar siswa memiliki pemahaman yang sama mengenai perilaku *bullying* sebelum mendesain strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi ataupun menghentikan perilaku *bullying* di sekolah. Pemahaman inilah yang nantinya juga akan disampaikan oleh agen perubahan kepada siswa lain di sekolah tersebut.

Program Roots Indonesia bersifat komprehensif dalam artian pendekatan yang dilakukan bukan hanya fokus kepada orang yang dibully atau orang yang membully tapi fokus kepada berbagai aktor yang telah dijelaskan di bagian lingkaran *bullying*. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan dan keunggulan dari Program Roots dibandingkan dengan program lainnya. Program ini berusaha memberdayakan dan mendukung seluruh siswa untuk menjadi karakter pembela yang berani melaporkan perilaku *bullying* dan berusaha menghentikan ketika terjadi perilaku *bullying* di sekolah.

Program ini juga sangat terkait dengan salah satu teori perubahan perilaku yakni penguatan positif (*positive reinforcement*) yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa yang berperilaku positif yang terkait dengan interaksi siswa akan mendapatkan reward atau penghargaan dari guru, dari agen perubahan, ataupun dari siswa lainnya. Hal inilah yang juga menjadi kunci sehingga program Roots dianggap sebagai program yang tepat dalam mengubah perilaku siswa.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis ada Program Analyst, Yayasan Indonesia Mengabdi dan dapat dihubungi melalui email yusri@unm.ac.id



DESAIN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN DAN PENGHIDUPAN

Oleh **TIRZA THEORUPUN**

Membicarakan ketimpangan pembangunan di Indonesia Timur tidak terlepas dari membicarakan kerentanan pemudanya. Fenomena disparitas ini banyak memengaruhi kehidupan pemuda, terutama pemuda di pedesaan yang sering mengalami kesulitan dalam kesehariannya untuk mempertahankan penghidupan.

Mendiskusikan kerentanan pemuda menjadi suatu hal penting. Di Maluku secara umum, banyak pemuda desa yang tidak mempunyai privilese untuk

mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Saat dunia berkembang pesat dengan percepatan teknologi, pemuda desa masih harus bersusah payah untuk memperoleh pendidikan layak atau bahkan sekedar bertahan hidup. Banyak pemuda tidak memiliki pilihan untuk memperoleh kualitas hidup dan membuatnya terasosiasikan dengan ketidakberdayaan.

Dari keresahan ini, timbul satu inisiatif untuk melawan ketidakberdayaan tersebut. Dimulai dari pesisir Seram Timur. Dimulai dari Keta.

Dari Literasi ke Inovasi Sosial

Keta adalah sebuah desa kecil di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Seperti kebanyakan desa lain di Maluku yang mempunyai keterbatasan terhadap akses dan tantangan pembangunan lainnya, Keta juga menghadapi masalah yang sama. Tapi, Keta punya sebuah aset sosial yang menjadi kekuatan bagi desa ini, yaitu sebuah taman baca. Taman Baca Keta diinisiasi oleh pemuda desa Keta sendiri, Ali Akbar Rumeon, bersama



Foto: Dok. Penulis

2 pemuda lainnya, Marjan Rumakamar dan Faris Rumin.

Ali Akbar dan teman-teman menginisiasi Taman Baca Keta setelah melihat permasalahan literasi yang ada di lingkungan mereka. Saat itu, banyak anak-anak yang masih belum bisa membaca padahal sudah mendekati waktu ujian sekolah. Mereka kemudian menjadi pengajar dan mentor bagi anak-anak Keta.

Konsistensi mereka sudah berjalan selama 6 tahun dan saat ini Taman Baca Keta sudah menjadi ruang aman bagi anak-anak Keta untuk belajar dan berproses untuk pengembangan diri. Anak-anak yang 6 tahun lalu diajar oleh Ali dan kawan-kawan, sudah menjadi remaja dan merekalah yang menjadi mentor bagi adik-adik dibawahnya. Regenerasi ini membuat ada keberlanjutan di Taman Baca Keta.

Namun, konsistensi dan keberlanjutan ini bukan tanpa pengorbanan. Ada pilihan hidup yang dibuat pemuda desa seperti Ali, Marjan, dan Faris untuk tinggal menetap di desa. Pengorbanan akan pendidikan tinggi serta pilihan pekerjaan yang terbatas di desa menjadi risiko yang mereka tanggung. Keterbatasan ini juga dialami banyak pemuda lain di Keta yang memilih menetap di kampung.

Masalah kerentanan pemuda ini yang kemudian menjadi latar belakang dilaksanakannya project Pengembangan Strategi Penghidupan bagi pemuda di Keta melalui *Co-Design Workshop* di Keta.

Co-design Workshop: Pengembangan Strategi Penghidupan di Keta

Co-design Workshop untuk pengembangan strategi penghidupan ini merupakan sebuah *action project* dari program INSPIRASI Indonesia *Young Leaders Programme* yang dilaksanakan oleh UnionAid dan MFAT New Zealand. *Project* ini dilakukan karena melihat tantangan pembangunan di Indonesia Timur yang banyak dialami oleh pemuda desa. Lewat *project* ini, penulis bersama-sama dengan pemuda desa Keta mendesain bersama strategi penghidupan dan mata pencaharian bagi pemuda di desa Keta.

Co-design adalah suatu *tools* untuk mendesain sebuah solusi atas masalah yang ada dengan menguji coba sebuah prototipe. *Co-design* ini dipakai karena metodenya mempunyai nilai inti partisipatif dan juga penelitian/riset, sehingga solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang berbasis bukti.

Tahapan awal *co-design* ini dimulai dengan tahap framing, di mana kami memfokuskan isu kami pada masalah kerentanan pemuda yang ada di Keta. Kemudian setelah melakukan fokus isu, kami memulai tahapan selanjutnya yaitu *exploring*. Di tahap ini, kami bersama dengan pemuda Keta melakukan penelitian atas masalah kerentanan pemuda di Keta dan juga melakukan eksplorasi bersama serta pemetaan untuk mengetahui potensi, aset, dan kondisi SDA, SDM, sosial, fisik, dan finansial yang ada di Keta. Selanjutnya adalah tahap *imagining*, yaitu tahap di mana kami mulai membayangkan dan menyusun solusi dari masalah kerentanan pemuda ini. Solusi yang dipilih kemudian diuji coba dalam bentuk prototipe di dalam tahap testing.

Dari proses *co-design workshop* ini, dihasilkan sebuah prototipe yang diuji coba sebagai strategi penghidupan dan mata pencaharian baru untuk mereduksi kerentanan pemuda di Keta.

Sarlalan: Pembuka Jalan

Setelah melihat hasil eksplorasi dan pemetaan sumber daya di tahap *exploring*, melihat potensi pasar, dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Keta, dihasilkanlah prototipe yang diuji coba adalah sebuah *pilot group unit* bisnis yang dikelola secara langsung oleh pemuda Keta, dan berfokus dalam memaksimalkan sumber daya alam di Keta dengan 3 prioritas kegiatan: kebun sayur, pembibitan pala dan cengkeh, serta produk untuk dipasarkan.

Diversifikasi penghidupan ini dipilih menjadi solusi yang diuji coba atas masalah kerentanan setelah melihat hasil riset kami di desa Keta. Diketahui bahwa sektor unggulan di Keta adalah pertanian dengan komoditas pala dan cengkih. Masyarakat Keta sangat bergantung pada cengkih dan pala. Namun ada kelemahan yang dimiliki yaitu pala dan cengkih merupakan tanaman musiman dan jumlah kepemilikan pohon tiap rumah tangga tidak banyak, sehingga pendapatannya tidak rutin. Dengan diversifikasi ini diharapkan menjadi alternatif adanya sumber

penghasilan bagi pemuda dan sumber pangan baru di Desa Keta.

Pilot group ini diberi nama SARLALAN. Sarlalan berasal dari bahasa Keta yang artinya buka jalan. Nama ini menjadi ikhtiar dan upaya bagi pemuda desa Keta untuk menjadi pembuka kesempatan baru untuk pembangunan desa.

Masalah Adaptif dan Mindset Inovasi Sosial

Dalam mengimplementasikan prototipe ini, dibutuhkan adaptasi dan waktu untuk mengembangkannya. Sebagaimana kita sedang mencoba mengatasi masalah kerentanan pemuda dan ketimpangan ekonomi di Keta, kita tidak seharusnya hanya fokus pada solusi teknis seperti membuat kebun, dan lain sebagainya. Namun perlu juga melihat gambaran utuhnya.

Sebagai sebuah permasalahan adaptif, solusi kadang perlu melibatkan perubahan perilaku, sikap, atau pendekatan. Dari hasil pengamatan kami, masalah yang ada di Keta tidak terbatas hanya dalam keterbatasan secara praktis dan teknis, namun juga ada pola pikir tertentu yang masih membatasi potensi diri pemuda. Pola pikir cepat sukses dan cepat menyerah masih banyak tertanam di wilayah ini. Sehingga melalui proyek ini, kami juga memperkenalkan konsep pola pikir inovasi sosial yang menjadi landasan dalam mengimplementasikan prototipenya.

Selain dengan pembentukan pola pikir, diharapkan desain prototipe dalam bentuk kelompok ini juga dapat membentuk semacam *support system* bagi pemuda di desa Keta untuk dapat mendukung satu sama lain, lebih adaptif, dan mampu bekerja secara konsisten.

Seperti benih yang baru ditabur, Sarlalan masih memerlukan banyak dukungan dan perhatian. Ia sementara menumbuhkan akarnya, mempersiapkan dirinya untuk terus bertumbuh. Berharap di masa depan, pemuda Keta akan dapat memetik buahnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Alumni Program INSPIRASI tahun 2019 dan sehari-hari bekerja di lembaga Inspiring Development (InDev) dapat dihubungi melalui email tirzatheorupun@gmail.com
Dokumentasi mengenai Sarlalan dan project ini dapat dilihat di: <https://youtu.be/kFFdccc2QfGU>

RAGAM DISABILITAS

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Disabilitas atau penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah sebelumnya, cacat atau penyandang cacat. Istilah “Disabilitas” dan “Penyandang Disabilitas” digunakan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016), sedangkan istilah “Cacat” dan “Penyandang Cacat” digunakan oleh Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997). Undang-Undang Penyandang Cacat tersebut digantikan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1). Dalam jangka waktu lama menurut undang-undang ini adalah paling singkat 6 bulan atau bersifat permanen.

Disabilitas Sangat Beragam

Definisi yang digunakan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mencakup kategorisasi ragam disabilitas yang sangat luas. Sementara selama ini, bahkan setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan, pun orang



masih menggunakan istilah cacat dan penyandang cacat, dan hanya mengetahui dan mengenal disabilitas terbatas pada orang-orang yang menggunakan kursi roda, tongkat kruk, dan tongkat alat bantu jalan untuk disabilitas netra.

Pengetahuan dan pemahaman tersebut sangat terkait dengan perkembangan ilmu sangat pengetahuan dan kebijakan. Karena itu, lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah langkah maju dalam kebijakan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons*



Foto: Dok. Program INKLUSI/Vajasan BAKTI

With Disabilities, CRPD 2006) melalui UU No. 19 Tahun 2011.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan ragam disabilitas lebih luas, walaupun masih membatasi penetapan disabilitas ganda atau multi yang harus dilakukan oleh tenaga medis (Pasal 4 ayat 2). Disabilitas ganda atau multi yang dialami penyandang disabilitas, tentu lebih kompleks yang membutuhkan identifikasi dan penanganan, tidak hanya oleh tenaga medis, tetapi juga psikolog dan pekerja sosial.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebut ragam disabilitas meliputi disabilitas

fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Demikian, juga, seorang penyandang disabilitas dapat mengalami disabilitas tunggal, ganda atau multi (Pasal 4 ayat 1 dan 2).

Penyandang disabilitas fisik atau disabilitas daksa adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi (kelainan saraf yang menyebabkan kehilangan fungsi sensorik dan motorik pada tungkai bawah), dan cerebral palsy atau lumpuh otak (gangguan otak yang memengaruhi kinerja otot, postur, gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh) akibat stroke atau kusta, serta *dwarfism* atau tubuh pendek/orang kecil (pertumbuhan kerangka abnormal karena faktor genetik maupun medis).

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi kognitif atau pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga kemampuannya dalam memahami informasi dan menerapkan keterampilan baru sangat kurang, antara lain gangguan kemampuan belajar atau lambat belajar, disabilitas grahita (kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata), dan down syndrome (kelainan genetik yang menyebabkan kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik).

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga mengalami keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Disabilitas mental terdiri dari dua ragam, yaitu:

1 Disabilitas psikososial, seperti ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), ODMK (orang dengan masalah kejiwaan), skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan yang berlebihan yang tidak pada tempat, misalnya khawatir tidak tentu, cemas, takut, bahkan menarik diri), dan gangguan kepribadian. ODGJ dan ODMK biasa juga disebut ODDP (orang dengan disabilitas psikososial);



Foto: Dok. Program INKLUSI/Vayasan BaKTI

2 **Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autism/syndrome asperger dan hiperaktif/ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*).** ADHD dalam bahasa Indonesia berarti gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Namun, ADHD tumpang tindih dengan disleksia (*dyslexia*) atau kesulitan yang terus-menerus dalam beberapa hal (membaca, menulis, mengarahkan gerak) dan dispraksia

Penyebab seseorang menjadi disabilitas juga sangat beragam. Ada yang menyandang disabilitas sejak lahir; mengalami kecelakaan, seperti jatuh dari pohon, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas; penyakit dan tindakan medis; dan karena lansia. Itu berarti semua orang potensial menjadi disabilitas.

(*dyspraxia*) atau ketidakmampuan untuk mengaturlah gerak.

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, yang disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, cedera, atau penyakit serius. Disabilitas sensorik antara lain netra atau penglihatan, rungu/tuli atau pendengaran, dan/atau disabilitas wicara. Sedangkan penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, misalnya penyandang disabilitas netra-tuli dan disabilitas rungu-wicara. Penyandang disabilitas ganda atau multi juga dapat berupa fisik-mental, fisik-intelektual, fisik-sensorik, intelektual-sensorik, mental-intelektual, fisik-mental-sensorik, dan fisik-intelektual-sensorik.

Pembagian ragam disabilitas yang disebutkan di atas adalah kategorisasi yang telah diketahui. Itu berarti tidak tertutup untuk penambahan ragam disabilitas lain yang terdiagnosa. Penyebab seseorang menjadi disabilitas juga sangat beragam. Ada yang menyandang disabilitas sejak lahir; mengalami kecelakaan, seperti jatuh dari pohon, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas; penyakit dan tindakan medis; dan karena lansia. Itu berarti semua orang potensial menjadi disabilitas. Orang-orang yang berumur panjang akan menjadi lansia (lanjut usia) berarti juga disabilitas.

Aksesibilitas dan Akomodasi Layak

Penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, karena itu perlu aksesibilitas yang disediakan untuk disabilitas. Aksesibilitas yang disediakan tidak hanya untuk disabilitas, tetapi juga untuk umum, karenanya bersifat universal. Di dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) disebut sebagai desain universal yang berarti desain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat

digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan (Pasal 2), misalnya bidang miring (*ramp*), pegangan (*handrail*), pegangan pada toilet, dan pintu geser bukan hanya untuk disabilitas, tetapi juga untuk semua orang, terutama ibu hamil, lansia, dan anak.

Sedangkan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Akomodasi yang layak lebih bersifat individual atau tematik, misalnya kursi roda, alat bantu dengar, pembaca layar, JBI (juru bahasa isyarat), pendamping, dan sebagainya.

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya secara setara untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, maka pemerintah harus menjamin akses bagi disabilitas pada lingkungan sosial dan layanan yang tersedia untuk publik. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan, serta penyediaan akomodasi yang layak bagi disabilitas.

Perlu afirmasi untuk mempercepat pemenuhan hak-hak disabilitas, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, sebagai langkah awal adalah membuat kebijakan dan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah dan ragam disabilitas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

DAUR ULANG UNTUK KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Menurut data *Making Oceans Plastic Free* (2017), penggunaan rata-rata kantong plastik di Indonesia setiap tahunnya adalah sebanyak 182,7 miliar. Dari jumlah tersebut total sampah kantong plastik mencapai 1,280,900 ton per tahun. Di Indonesia, kantong plastik masih menjadi barang konsumsi sehari-hari padahal rata-rata hanya digunakan sekitar 12 menit kemudian dibuang. Untuk Makassar sendiri jumlah sampah rata-rata yang dihasilkan satu orang adalah 0,6 kg. Jika jumlah penduduk Makassar 1,5 juta jiwa maka, setiap hari ada sekitar 900 ribu kilogram sampah yang dihasilkan dimana 12% dari 900 ribu ini adalah sampah plastik.

Tingkat daur ulang sampah plastik masih rendah, sehingga lebih banyak kantong plastik berakhir menjadi sampah yang pada akhirnya akan terbuang ke lautan. Sampah yang masuk ke laut tentunya akan merusak ekosistem di dalamnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik. Salah satu cara pengendalian sampah dilakukan dengan mengolah kembali atau yang disebut *recycle*. Adalah Akmal Idrus seorang anak muda Makassar yang mendirikan sekaligus menggawangi sebuah usaha sosial yang bernama Rappo Indonesia.

Rappo merupakan usaha sosial yang menawarkan produk daur ulang sampah kantong plastik sekali pakai (kresek) yang dibuat menggunakan tangan oleh para perempuan pesisir di kota Makassar. Rappo fokus memberdayakan penjahit lokal, masyarakat di kawasan prasejahtera dan kawasan pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberdayaan ini bertujuan memberikan dampak positif bagi perempuan di Kota Makassar dan tentunya juga bagi lingkungan.

“Usaha yang dijalankan saat ini fokus pada penjualan produk olahan sampah plastik yang berbeda dibandingkan produk pada umumnya, karena Rappo mengkombinasikan sampah kantong plastik yang tidak bernilai menjadi produk yang full color dengan model unik yang mengusung konsep *recycle*” ungkap Akmal. Selain berorientasi bisnis, Rappo memiliki mimpi untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dalam hal ini berdampak bagi perempuan di Kota Makassar.

Saat ini Rappo berkolaborasi bersama masyarakat pesisir khususnya kelompok perempuan di Kelurahan Untia kota Makassar. Kelompok perempuan dipilih sebagai kelompok dampingan karena menurut Akmal, peran perempuan seringkali masih dianggap sebagai



Foto-foto: Dok. Rappo Impact Centre

peran pendukung di mana laki-laki masih memegang posisi superior termasuk dalam hal pekerjaan. Dalam hal kesempatan kerja, laki-laki masih lebih diprioritaskan padahal perempuan juga punya mimpi, mereka juga punya hak untuk memiliki pekerjaan atau mendukung ekonomi keluarga mereka. Kelurahan Untia juga dipilih karena posisinya yang berada di kawasan pesisir pantai dimana biasanya sampah kota bermuara.

Dalam menentukan anggota kelompok perempuan yang terlibat, seleksi dilakukan dengan selektif karena Rappo berharap apa yang dilakukan bisa bertahan bukan hanya 1-2 tahun ke depan tapi sepanjang program berjalan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menyeleksi anggota yakni tingkat pendapatan berada di bawah rata-rata, memiliki dan berkomitmen meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan, dan yang paling penting punya keinginan yang kuat.

Saat ini jumlah anggota yang sudah dilatih sebanyak 15 orang, tim produksi ada 7 orang sedangkan untuk tim yang bekerja di belakang layar dalam Rappo sendiri ada 12 orang yang kesemuanya adalah anak muda.

Bagaimana Rappo Bekerja

Dalam proses pengumpulan plastik sebagai bahan baku utama, Rappo mengemasnya dalam beberapa program menarik. Salah satu program pengumpulan sampah di beri nama Tukar Sampah jadi Kebutuhan. Dalam program ini, warga Untia diminta menyeter sampah kantong plastiknya dimana setiap plastik bernilai poin, misalnya kantong plastik yang kecil poinnya 2, yang sedang 4, dan yang besar 6. Dari akumulasi poin tersebut dapat dikonversi menjadi bahan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan pokok. Rappo juga terbuka dan menerima jika ada pihak yang tidak bisa mengolah sampah plastiknya dan ingin mendonasikannya.

“Saat ini kita juga banyak berkolaborasi dengan tempat laundry di Makassar untuk mendapatkan sampah kantong plastiknya” ungkap Akmal. Usaha laundry dipilih sebagai mitra karena Rappo melihat jumlah tempat laundry di Makassar sangat banyak. Setiap pelanggan yang datang akan membawa serta kantong kresek dan akan diberi kantong kresek yang baru saat cucian selesai, hal ini

tentunya mendatangkan tumpukan sampah plastik yang banyak.

Untuk proses selanjutnya, sampah kantong plastik yang terkumpul ditampung di Rappo center Kelurahan Untia untuk didaur ulang. Ada tim khusus yang menangani proses awal yang diberi nama *management and upcycle officer*. Tim ini bertugas mengkombinasikan atau memadu padankan pola atau motif plastik yang terkumpul. Setelah itu barulah dijahit oleh kelompok perempuan Untia dengan mengkombinasikannya dengan material-material lain agar diperoleh produk yang lebih menarik.

Sebelum mulai mengolah plastik menjadi barang-barang berguna yang estetik, kelompok perempuan kelurahan Untia terlebih dahulu diberi pembekalan berupa pelatihan menjahit dan pengolahan produk. Rappo bukan hanya hadir untuk memberikan keahlian membuat produk kepada kelompok perempuan tetapi bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan kualitas dan juga peran perempuan di masyarakat.

Selain memberikan pelatihan pengolahan produk, anggota kelompok juga diberikan *supporting education*, seperti pelatihan dengan materi finansial literasi dan kegiatan meditasi untuk kesehatan mental dalam bentuk *journaling*. Dalam kegiatan *journaling* ini, anggota kelompok diajak untuk menuliskan ide, pikiran atau cerita keseharian mereka dalam bentuk jurnal baik secara digital maupun manual. “Kita berupaya mentransfer sebuah nilai atau pembelajaran bagaimana menyampaikan pendapat, gagasan dalam bentuk tulisan mengingat budaya Makassar adalah budaya bertutur” cerita Akmal.

Rappo yang dalam Bahasa Bugis Makassar berarti buah saat ini dalam proses asesmen untuk menjajaki peluang kolaborasi dengan kelompok perempuan di Depok, Jawa Barat. Jadi selain memberikan dampingan untuk perempuan pesisir juga akan menguatkan kelompok perempuan di wilayah urban. “Intinya perempuan yang berpendapatan rendah kami

akan libatkan” ungkap Akmal. Rappo berharap produk-produk hasil kolaborasi dengan kelompok perempuan tidak hanya bisa diperoleh di Kota Makassar namun juga di beberapa kota lainnya.

Produk Rappo berkaitan erat dengan gaya hidup atau *lifestyle*. Dari hasil pengamatan Rappo, beberapa kota memang sudah ada kecenderungan lebih *aware* terhadap gaya hidup ramah lingkungan seperti Bali, Bandung dan Jakarta. Di kota-kota ini orang-orang mulai sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan salah satunya dengan menggunakan produk daur ulang atau produk eco friendly. Rappo berharap gerakan ini dapat menjadi pride atau semangat anak muda dan perempuan dari Makassar untuk Indonesia.

Rappo menasar segmen anak muda sampai usia 30an, olehnya produk-produk yang dihasilkan berupa totebag, backpack, ada juga sling bag untuk handphone dan beberapa produk lainnya. “Yang paling penting adalah bagaimana produk-produk yang kita ciptakan dapat menjawab kebutuhan orang-orang” cerita Akmal. Meski ramai digaungkan pengolahan dan penggunaan barang berbahan limbah, banyak yang mengasumsikan bahwa produk ramah lingkungan itu mahal atau cepat rusak, hal ini yang Rappo ingin dobrak dengan menunjukkan sebuah kualitas yang menjawab kebutuhan konsumen.

Selain dipasarkan secara langsung, produk Rappo juga dapat dijangkau melalui *media marketplace*. Produk mereka tersedia di Tokopedia, Shopee atau jika ingin melihat langsung produknya bisa mengunjungi gerai mereka di store Jl. Pengayoman Makassar atau di MBlok Space Jakarta.

Kolaborasi

Dalam kerja-kerjanya, Rappo berkolaborasi dengan beberapa pihak. Rappo berkolaborasi dengan komunitas, pemilik usaha maupun individu, dimana selama periode tertentu secara bersama-sama mengumpulkan sampah kantong plastik dari lingkungan masing-masing yang bertujuan mengurangi sampah plastik yang tidak

terkelola dengan baik. Kedepannya Rappo juga akan bekerja sama dengan Mall Sampah. Mall Sampah adalah salah satu *start up* yang menghimpun sampah-sampah kota dengan berbasis aplikasi online.

Rappo sangat terbuka untuk peluang kolaborasi seperti pelaksanaan *workshop* bersama. Sebelumnya di event Makassar *International Writer Festival* dibuat sebuah kegiatan di mana peserta *workshop* datang membawa sampah kantong plastik masing-masing. Tim Rappo lalu mengajak peserta yang hadir untuk bersama-sama mendaur ulang sampah plastik tadi menjadi cincin atau gantungan kunci yang unik-unik.

Rappo telah bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun berjalan, Rappo tentunya menghadapi beberapa tantangan. Di awal menginisiasi ide, tantang terbesar adalah bagaimana meyakinkan orang untuk bisa terlibat dan berpartisipasi menjadi tim Rappo. “Awal merintis memang merupakan perjuangan berat karena semua saya lakukan sendiri mulai dari proses pengumpulan sampah, produksi hingga ke pemasaran” kata Akmal. Tantangan selanjutnya yang ditemui adalah terkait bagaimana ide ini bisa menemukan model bisnisnya. Namun dengan berjejaring, mengikuti program-program pengembangan kolaborasi Rappo dapat menemukan bentuknya hingga berkembang sampai sekarang. Saat ini Rappo sudah menerima banyak pesanan dari konsumen dan paling penting produknya sudah bisa diterima masyarakat.

Dampak atau Perubahan Positif

Selama 3 tahun bekerja, berbagai perubahan baik tentunya sudah dihasilkan Rappo, baik untuk Rappo sendiri dan tentunya untuk kelompok perempuan dampingan di Kelurahan Untia. Dari segi pendapatan Rappo berkontribusi pada peningkatan pendapatan perempuan-perempuan di Untia dan pekerja lokal. Pendapatan yang mereka dapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang digunakan untuk pendidikan. Rappo

memberikan *skill* kepada anggota kelompok dengan harapan mereka tidak hanya berkembang di Rappo tapi mereka bisa memaksimalkan keterampilan yang diperoleh untuk bertumbuh seperti apa yang mereka inginkan. Terkait pengetahuan lingkungan, anggota kelompok juga sudah mulai memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik untuk menjaga kebersihan dan mengelola sampah yang dihasilkan.

Terkait lingkungan, Rappo berkontribusi untuk lingkungan dengan kegiatan daur ulangnya. Rappo memproduksi seribu produk per bulan dan setiap produk Rappo menggunakan 5 sampai 30 lembar sampah kantong plastik, jadi bisa dikatakan Rappo berhasil mengurangi sekitar 10 ribu lembar sampah plastik di Makassar setiap bulannya.

Rencana Pengembangan

Saat ini Rappo sedang fokus mengembangkan program yang sama di Depok Jawa Barat. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana Rappo bisa melakukan penguatan-penguatan secara internal. Akmal berharap untuk 1 tahun ke depan ia dapat menemukan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama untuk pengembangan Rappo yang lebih baik. Masih banyak target-target yang ingin diwujudkan Rappo terutama pada pengembangan produk. Jika di awal produk yang dikembangkan adalah produk yang sifatnya *basic*, sering digunakan, lebih ke alasan memperkenalkan dan mengkampanyekan pengolahan limbah plastik, namun kedepannya Rappo berharap dapat meningkatkan level kualitas produk, bukan hanya dibutuhkan tetapi membuat tampilan yang lebih *fashionable*. “Dengan adanya kolaborasi dengan *designer-designer*, akan meningkatkan nilai produk Rappo dan tentunya mempromosikan *sustainability lifestyle*” harap Akmal.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi mengenai kegiatan Rappo dan produk-produk yang dipasarkan secara dapat diperoleh dengan mengunjungi Instagram @rappo.id atau di www.rappo.indonesia.com. Etalase online ada di Tokopedia dan Shopee dengan akun Rappo Indonesia.

Informasi lebih detail mengenai inisiatif ini dapat menghubungi

Akmal Idrus (Founder dan CEO Rappo Indonesia)

Email: halo@rappoindonesia.com



D

iakui atau tidak diakui, wilayah administratif Kota Pare-Pare sejatinya menghadapi keterbatasan untuk mampu lebih jauh mengembangkan skala pembangunannya. Daya dukung sumberdaya alam dan sumber daya manusia pun juga terbatas. Apalagi kondisi topografinya ikut membatasi gerak langkah pengembangan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan perspektif kewilayahan untuk keberlanjutan pembangunan Parepare ke depan.

PAREPARE DAN LAYANAN KEWILAYAHAN

Oleh
ABDUL MADJID SALLATU

Dalam wawasan perencanaan pembangunan, Parepare akan tetap merupakan wilayah administratif perencanaan, namun untuk pengembangan skala pembangunannya sangat penting untuk memanfaatkan wilayah pengamatan sebagai sumber *emerging resources*. Dari segi kesejarahan, keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Parepare pada dasarnya adalah berbasis pada geografinya. Terutama dengan keberadaan wilayah teluk yang sangat menunjang efektivitas layanan lalu lintas perairan pantai, sehingga

mobilitas barang dan manusia sudah berkembang bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Itu berarti, telah menjadi warisan sejarah, bahwa Parepare sejak lama sudah mendapatkan dukungan *emerging resources* wilayah *Ajatappareng*.

Ajatappareng adalah sebuah kawasan di bagian barat Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah historis dari persekutuan lima kerajaan: Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Persekutuan lima kerajaan ini dibentuk pada abad ke-16 sebagai respons terhadap





Foto: Istimewa

meningkatnya pengaruh Gowa-Tallo di selatan dan *Tellumpoccoe* - yang melibatkan tiga kerajaan Bugis (Bone, Wajo, dan Soppeng)-di timur. *Ajatappareng* menjadi kekuatan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan hingga kemundurannya pada abad ke-17. Bekas konfederasi ini kini menjadi bagian dari beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Mungkin dapat dikatakan bahwa Parepare *is nothing but Ajatappareng*.

Perintah undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk menata dan memperkuat kerjasama daerah di wilayah *Ajatappareng* sudah merupakan hal yang niscaya. Peran yang bisa dimainkan oleh Parepare adalah memperkuat sistem layanan kewilayahan. Oleh karena hanya dengan demikian, Parepare akan dapat memetik kemanfaatan surplus wilayah dari daerah sekitarnya. Hal ini lebih lanjut pentingnya menghadirkan budaya birokrasi dari yang sebelumnya hanya mencermati wilayah administratifnya sendiri dikembangkan dalam kerangka budaya pelayanan yang mencakup *Ajatappareng*, baik masyarakat maupun pelaku pembangunannya.

Itu berarti bahwa Parepare akan dapat mengambil peran sebagai simpul konektivitas pelayanan antara pemerintahan provinsi dan daerah-daerah yang tercakup dalam *Ajatappareng*. Misalnya, melalui pengembangan simpul supervisi dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam berbagai bidang pemerintahan. Dari segi kesejarahan, Parepare sejak lama telah memiliki jaringan pelayanan sampai ke Sulawesi Barat. Bahkan bisa dikembangkan lebih jauh mencakup layanan kelembagaan jasa keuangan. Fungsi layanan dan fasilitasi, bila dikreasikan di Parepare akan memiliki *spread effect* bagi kehidupan masyarakat dan pelaku pembangunannya.

Pada intinya, dengan menyadari daya dukung sumber daya yang terbatas yang tersedia di Parepare, kreativitas dan inovasi berpikir pada jajaran pemerintahan sangat perlu didorong dan dikembangkan. Apabila di waktu-waktu yang lalu, predikat sebagai kota dagang sudah dimiliki, maka sudah saatnya memikirkan pengembangan kegiatan jasa-jasa yang lebih luas cakupannya. Berarti, wawasan pengembangan Parepare sebagai daerah administratif sebenarnya tidak

Layanan kewilayahan yang dimaksudkan disini adalah sejatinya saling mempertukarkan keunggulan yang bersifat komparatif, sehingga semua daerah yang terlibat akan bisa mencipta dan atau mendapatkan surplus pembangunan masing-masing.

hanya menjadi milik warganya semata. Sekali lagi, realitas ini sebenarnya telah merupakan warisan sejarah Pare-Pare sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Langkah awal yang penting dilakukan adalah menata dan mengembangkan sistem informasi perencanaan yang juga tidak hanya mencakup wilayah administratifnya. Tetapi setidaknya mencakup mulai dari kabupaten-kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang. Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah-daerah tersebut, untuk mengidentifikasi layanan kewilayahan apa yang mampu disiapkan dan ditawarkan oleh Parepare. Layanan kewilayahan yang dimaksudkan disini adalah sejatinya saling mempertukarkan keunggulan yang bersifat komparatif, sehingga semua daerah yang terlibat akan bisa mencipta dan atau mendapatkan surplus pembangunan masing-masing.

Namun harus disadari bahwa dalam wawasan layanan kewilayahan ini bukan untuk menempatkan Parepare sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan dan daerah lainnya sebagai *hinterland*. Justru, Parepare yang akan hadir sebagai penopang bagi daerah-daerah di sekitarnya, melalui pencapaian skema yang bersifat *mutual benefits*. Dengan demikian, sepenuhnya berbasis pada gagasan untuk

mengefektifkan program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi di wilayah *Ajatappareng*. Idealnya, mengacu pada premis, demi efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya dan efektif mencapai kinerja pembangunan masing-masing daerah yang terlibat. Itu berarti, Parepare perlu tampil sebagai daerah penggagas yang menawarkan layanan kewilayahan.

Hal terkait lainnya, bahwa untuk mengoptimalkan kinerja layanan kewilayahan yang dimaksudkan ini, penguatan kelembagaan dan perubahan *mindset* segenap ASN pada jajaran Pemkot Parepare menjadi syarat perlu (*necessary condition*), di satu sisi. Pada sisi yang lain, dibutuhkan kehadiran pemimpin puncak pemerintahan yang memahami dan menguasai *organizational leadership*, sebagai syarat harus (*sufficient condition*). Fungsi pemerintahan yang dijiwai oleh pemberian layanan (*services delivery*) dan fungsi pembangunan yang disemangati oleh fasilitasi kebutuhan (*facilitating the needs*) akan sekaligus menjadi pencerminan dalam kehidupan masyarakat luas yang diayominya. Suka atau tidak suka, apapun keberhasilan yang dicapai oleh Parepare sampai detik ini, bukanlah semata-mata hasil kerja pemerintah. Terlalu naif untuk menafikan peran dan sumbangan masyarakat dan pelaku pembangunan, termasuk dari daerah sekitarnya.

Oleh karena itu, peran kelembagaan perencanaan pembangunan Parepare dituntut semakin memperluas wawasan perencanaannya. Terutama dalam memaknai bahwa Parepare tetap sebagai wilayah perencanaan, namun untuk tujuan perbesaran skala pembangunannya, maka Ajatappareng sepatutnya mampu dijadikan sebagai wilayah pengamatan. Perencanaan pembangunan Parepare sepatutnya mampu ditampilkan sebagai pemicu bagi pengembangan wilayah *Ajatappareng*. Semoga!

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com

Oleh **AGUSSALIM**



erebaknya kemiskinan ekstrem saat ini akibat efek pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berkepanjangan dan melonjaknya harga pangan. Pandemi COVID-19, meski mulai melemah, namun belum sepenuhnya berakhir dan masih menimbulkan ketidakpastian. Pada saat yang sama, terganggunya rantai pasok pangan global akibat perang Rusia dengan Ukraina telah menyebabkan terjadinya krisis pangan yang memicu harga pangan ke level tertinggi sedikitnya dalam satu dekade terakhir. Inflasi pangan memiliki dampak yang sangat buruk pada keluarga miskin. Orang miskin di negara-negara berpenghasilan rendah menghabiskan sekitar dua pertiga dari sumber daya mereka untuk makanan, sehingga kenaikan harga pangan akan memicu kemiskinan yang lebih dalam.

Memburuknya situasi saat ini telah menyebabkan populasi kemiskinan ekstrem terus membengkak. Populasi penduduk yang benar-benar melarat semakin bertambah. Laporan terbaru Bank Dunia (2022) memperkirakan jumlah orang miskin ekstrem bertambah sekitar 75 juta hingga 95 juta orang di berbagai belahan dunia seiring dengan meningkatnya



MEMBERANTAS KEMISKINAN EKSTREM: KONVERGENSI PROGRAM BERBASIS SASARAN

(BAGIAN 1)



Foto: Yayasan BAKTI/Musuf Ahmad

harga pangan dan energi. Pada akhir tahun 2022, diperkirakan sebanyak 685 juta orang atau sekitar 9 persen dari populasi global, hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Hasil studi terbaru United Nations Development Programme (UNDP) (2022) juga mengungkapkan bahwa 71 juta orang terdorong masuk ke dalam kemiskinan ekstrem sebagai akibat dari melonjaknya harga makanan dan energi. Studi ini melihat terjadinya krisis biaya hidup di negara-negara berkembang dan Sub-

Sahara Afrika sebagai pusat krisis. Mereka ini tinggal di perumahan yang buruk dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Laporan ini menyebutkan bahwa krisis biaya hidup saat ini mungkin yang terbesar setidaknya dalam satu generasi, dan itu terjadi karena negara memiliki kapasitas yang semakin terbatas untuk mengatasinya.

Meluasnya kemiskinan ekstrem, termasuk di Indonesia, telah memaksa pemerintah untuk

Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemiskinan ekstrem dipandang sebagai bentuk kemiskinan yang paling buruk, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi

melakukan mitigasi dengan memberi perhatian serius. Sebagai langkah awal, di pertengahan tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi Presiden ini telah memberi mandat kepada semua pihak terkait, termasuk 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota), untuk terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Instruksi Presiden ini menekankan pada ketepatan sasaran dan integrasi program para pihak dengan berfokus pada tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Menghadapi situasi ini, penting untuk merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dapat memandu upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem secara terstruktur dan sistematis di tengah lingkungan sosial ekonomi

yang berubah dengan cepat dan seringkali tak terduga. Jika ini tidak dilakukan, jutaan orang akan terus hidup dalam kemelaratan.

Secara sederhana, kemiskinan ekstrem adalah mereka yang paling miskin di antara orang miskin (*the poorest of the poor*). Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemiskinan ekstrem dipandang sebagai bentuk kemiskinan yang paling buruk, yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kondisi ini tidak hanya bergantung pada pendapatan tetapi juga pada akses ke layanan publik. Secara terukur, Bank Dunia mengidentifikasi seseorang mengalami kemiskinan ekstrem saat seseorang tersebut hidup dengan pendapatan/pengeluaran kurang dari

USD 1,90 per hari berdasarkan ukuran varitas daya beli (*purchasing power parity*). Sejak September 2022, Bank Dunia menaikkan standar tersebut menjadi USD 2,15 per hari guna menyesuaikan dengan efek inflasi.

Kompleksitas dan Karakteristik Kemiskinan Ekstrem

Dampak buruk terhadap kemiskinan ekstrem bermula dari munculnya wabah COVID-19. Sebagian pekerja terpaksa harus dirumahkan dan sebagian lainnya harus rela kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial telah menyebabkan aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi menurun secara drastis, sehingga sebagian orang harus kehilangan pendapatan. Akibat situasi ini, diperkirakan kelompok rentan (mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan) akan kembali terperangkap ke dalam jeratan kemiskinan. Sedangkan mereka yang sudah miskin, terjerembab ke dalam lubang kemiskinan yang lebih dalam.

Dalam catatan BPS, COVID-19 telah mendorong angka kemiskinan ke level yang lebih tinggi dan memunculkan orang miskin baru. Jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 2,76 juta jiwa selama periode September 2019 (sebelum munculnya COVID-19) ke September 2020 (setelah wabah COVID-19 merebak). Tingkat kemiskinan bergeser ke atas dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen pada periode yang sama, atau kembali ke level yang hampir sama dengan lima tahun lalu. Semua upaya penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir seolah-olah tidak meninggalkan bekas.

Saat pandemi COVID-19 mulai mereda dan perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, muncul konflik Rusia – Ukraina yang merubah tatanan ekonomi global dan menyebabkan situasi yang mulai membaik kembali memburuk. Ini bentuk pukulan beruntun yang menjerumuskan ekonomi global ke dalam lubang krisis. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dampak krisis saat ini hampir pasti akan dirasakan di sebagian besar negara hingga tahun 2030. Dengan kondisi ini, tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan absolut global menjadi kurang dari 3 persen pada tahun 2030, yang sudah berisiko sebelum pandemi, sekarang di luar jangkauan, kecuali negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang cepat, signifikan, dan substansial (World Bank, 2022).

Krisis ekonomi global, yang salah satunya ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, telah menyebabkan mereka yang hidup di *bottom level* dalam hirarki distribusi pendapatan, benar-benar mengalami kesulitan. Inflasi yang berbasis luas dan cenderung persisten mengakibatkan kerawanan pangan meningkat secara signifikan. Begitu pula jumlah orang yang menderita kekurangan gizi menjadi bertambah. Masalah ketahanan pangan dan nutrisi tampaknya telah menjadi masalah serius saat ini.

Bagi mereka yang sudah miskin sebelum datangnya hantaman pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global, mengalami kondisi

kemiskinan yang semakin parah. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021. Angka ini diperkirakan merambat naik di tahun 2022 seiring dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Memerangi kemiskinan ekstrem menjadi semakin menantang, bukan hanya karena harus menangani yang termiskin dari yang miskin, tetapi juga target pemerintah untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi tampak mustahil.

Sesungguhnya pemerintah dapat mengurangi dampak kenaikan inflasi pangan pada keluarga miskin melalui kebijakan perlindungan sosial. Namun, agak berbeda dengan periode inflasi pangan yang tinggi pada periode sebelumnya, keuangan pemerintah terkuras akibat berbagai langkah fiskal yang dilakukan selama merebaknya pandemi COVID-19. Pemerintah terpaksa harus melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19. Untuk ekonomi yang masih belum pulih dari pandemi, inflasi tinggi benar-benar memberi tekanan berat bagi pemerintah.

Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen dari total populasi. Angka ini diperkirakan merambat naik di tahun 2022 seiring dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Wilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan kumuh perkotaan menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem. (Bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Kepala Divisi Formulasi Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan Peneliti Senior pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Universitas Hasanuddin.
Email : agussalim@fe.unhas.ac.id www.agusjero.blogspot.com

MENJADI FASIL



Foto: Yayasan BaKTI/adwit B Pramono

Oleh **DANI WAHYU MUNGGORO**

Fasilitator itu orang biasa. Ia bukan pemimpin yang dielu-elukan. Ia seharusnya tidak terlihat. Tapi kita percaya, orang-orang yang kita sentuh, bisa mengubah dunia.

Kita percaya dengan membangkitkan rasa dan semangat, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil, setara, bahagia dan damai. Paulo Freire memiliki istilah untuk semua ini, dunia yang lebih mudah untuk bercinta.

Menjadi yang gaib di mata banyak orang, adalah pilihan. Kita menyimak dan menangkap semua percakapan yang bermakna. Kita menimba dari berbagai proyek kreatif, kolaborasi yang kian masif dan ide-ide segar yang mendunia.

Kita tak pernah berhenti berkontemplasi, apa yang bisa kita bantu bagi banyak orang. Apa yang bisa membuat orang berbinar-binar menekuni hidup dan kehidupannya.

Kita membantu mereka menemukan kekuatan diri. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi. Kekuatan-kekuatan yang sengaja dibunuh sejak dini. Kekuatan-kekuatan itu menjadi energi. Energi yang menyalakan pelita dimana-mana.

Kita mengasah rasa dan imajinasi mereka untuk berani menangkap masa depan. Masa depan bukan yang dibentuk orang lain. Atau, orang yang berkuasa. Masa depan bisa dibentuk oleh siapa saja.

Kita adalah kaum optimis. Pada masa yang paling kelam pun, kita mencari cahaya. Cahaya bagi semua. Selama ada yang menyalakan pelita, harapan selalu ada.

Fasilitator pada gilirannya mendorong setiap orang menjadi *Warriors for Human Spirit*. Pejuang Keagungan Insani. Keagungan insani hanya bisa diaktivasi oleh dirinya sendiri. Fasilitator hanya memicu agar semua orang menggerakkan kecerdasan pikiran, hati, tubuh dan jiwanya.

"Kita tidak bisa mengubah dunia saat ini. Namun, dengan membuka pikiran, hati, tubuh dan jiwa pada dunia, kita bisa menemukan keberanian, kepasrahan dan kelembutan bukan pada diri kita sendiri melainkan pada semua orang," kata Master Buddha Tибetan, Chogyam Trungpa.

Selama lebih dua puluh tahun, kita terus mencari apa itu fasilitasi atau mudah. Bagaimana kita bisa membantu orang dengan membuat semua hal menjadi lebih mudah. Bukan hal yang sederhana. Karena mudah bukan sederhana.

Membuat mudah berarti bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja kreatif. Ketika orang semakin suka menambahkan sesuatu, kita justru mengurangi atau menghentikan sesuatu.

Menambahkan pada sebuah sistem adalah sesuatu yang mudah. Dan sistem biasanya bergeming dan tidak merasa terancam. Sistem tidak berubah.

Sebaliknya bila kita mengurangi sesuatu dari suatu sistem. Ia akan mengalami iritasi. Ia tidak suka. Sistem itu bergerak. Gerakan itu hanya penanda, ada yang sedang berubah.

Menjadikan mudah dan sederhana sesuatu seperti bentuk, proses dan *mindset* perlu

mengurangi hal-hal yang distraktif. Kita harus belajar merelakan dekorasi-dekorasi itu pudar dan hilang. *Letting go*, kata Otto Scharmer, penggagas *Theory U*.

Mudah tidak selalu mudah. Orang berfikir kalau bisa diperumit mengapa dipermudah. Membuat mudah seperti cara berpikir yang keliru. Kerumitan adalah simbol kepandaian. Boleh jadi, mudah itu bodoh.

Karena itu, saya teringat peristiwa pada sebuah kegiatan parade inovasi sosial di Ambon, Maluku, beberapa tahun lalu. Seorang menteri yang hadir pada kegiatan itu terheran-heran dengan berbagai inovasi sosial dari Kawasan Timur Indonesia. "Ternyata solusi-solusi yang ditawarkan itu mudah dan sederhana, mengapa kita di Jakarta berpikirkannya rumit-rumit,"

Pernyataan di muka sering kita dengar. Betapa orang lebih suka menciptakan kerumitan-kerumitan baru dengan niat memudahkan. Seperti, memproduksi terus menerus regulasi untuk lebih mudah atau lebih rumit?

Fasilitasi pada galibnya mengembalikan manusia pada kemanusiaannya. Kembali pada tubuhnya. Kembali pada hatinya. Kembali pada nalarnya. Kembali pada spiritualitasnya.

Semakin banyak manusia bisa mengaktifkan keagungan insaninya, kian mungkin dunia berubah menjadi lebih baik.

Sebagai fasilitasi, kita memang tidak bisa mengubah dunia. Kita menyadari bahwa semua hal hadir dari mana saja, kebaruan menjadi kunci perubahan, identitas penting pada pembaharuan dan menyadari untuk selalu awas pada kompleksitas dan ketidakmenentuan.

Fasilitasi boleh jadi adalah petualang untuk membantu setiap orang "*back to human*", kembali kepada kemanusiaannya. Fasilitasi mengajak ke masa lalu yang mengasyikan. Fasilitasi mengajak menangkap berbagai hal dari masa depan. Kita perlu belajar mengendapkan berbagai hal untuk menjadi fasilitasi yang vibrant.

Dirgahayu Inspirasi Tanpa Batas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Ideas Creator Inspirasi Tanpa Batas (INSPIRIT)

Perubahan iklim menjadi isu yang krusial saat ini. Di tengah meningkat pesatnya aktivitas pembangunan, dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat mulai terasa. Salah satu bentuknya ialah pencemaran udara.

Sebuah studi di tahun 2018 dari Health Canada menggunakan metode pengumpulan data baru yang disebut *Global Exposure Mortality Model* (GEMM) untuk memperkirakan bahwa hingga 8,8 juta orang meninggal dunia karena polusi udara.

Pencemaran udara pun kini meningkat seiring dengan meningkatnya pula aktivitas industri dan mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan yang dikutip dari dataindonesia.id 22 November 2022, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 141,99 juta unit pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 4,30 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 136,14 juta unit.

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terpantau terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada 2018, yakni 6,38%.

Akibatnya, Jakarta sebagai ibu kota dan pusat perekonomian Indonesia pun mengalami dampak tersebut. Dikutip dari



PERAN PEMDA DALAM MENJAMIN HAK WARGA MENGHIRUP UDARA BERSIH

Oleh **FINASTRI ANNISA**



Foto: Istimewa

Kompas.com, 16 September 2022, Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Koalisi Ibu Kota) mengungkapkan kualitas udara Jakarta tergolong tidak sehat selama 115 hari sepanjang Januari-Agustus 2022.

Angka itu merupakan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diambil dari situs lingkungan hidup.jakarta.go.id. Kemudian, berdasarkan situs yang sama, sepanjang Januari-Desember 2021, ada 139 hari di mana kualitas udara di Jakarta tergolong tidak sehat.

Tak hanya di Jakarta, pencemaran udara juga terjadi di wilayah penopang Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dikutip dari

Kompas.id pada 10 Agustus 2022, Di Kota Bekasi, Jawa Barat, kualitas udara dikategorikan tidak sehat pada Minggu (7/8/2022) pukul 15.00 hingga pukul 17.00. Data itu berasal dari salah satu stasiun pemantau kualitas udara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ditempatkan di Sumur Batu, Kota Bekasi. Dari data yang terekam dari stasiun itu, konsentrasi indeks standar pencemaran udara (ISPU) PM_{2,5} sebesar 102.

Di Tangerang dan Tangerang Selatan, pada Agustus 2022, data yang terekam dari stasiun milik KLHK menunjukkan ISPU PM_{2,5} di dua kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi

Banten ini dikategorikan tidak sehat. Dari pukul 15.00 hingga pukul 21.00, ISPU PM_{2,5} di Tangerang Selatan mencatatkan angka tertinggi 109 dan Tangerang bahkan mencapai angka 115.

Tingginya angka pencemaran udara di sejumlah kota khususnya di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan pemerintah daerah (Pemda) belum mampu memfasilitasi masyarakat untuk hidup sehat dengan menghirup udara yang bersih. Padahal hidup sehat merupakan bagian dari salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi Negara, dalam hal ini melalui perangkat pemerintah daerah (Pemda). Pemda memiliki kewajiban terhadap perubahan iklim lantaran membawa dampak buruk bagi masyarakat seperti pencemaran udara.

“Ketika bicara HAM di Indonesia, Pemda memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemenuhan HAM,” ujar *Senior Program Officer on Human Rights and Democracy* INFID Abdul Waidl dalam *Special Session WHRCF 2022* pada 11 Oktober lalu.

“Karenanya, INFID mendorong adanya kelompok kerja dan kebijakan sampai tingkat teknis, yang mengedepankan kerja sama dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya,” tutur Abdul.

Adapun dalam menangani pencemaran udara, Negara memiliki payung hukum berupa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 98 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah. Karena itu, dalam hal penanganan pencemaran udara yang dampaknya merugikan kesehatan masyarakat, Pemda sudah semestinya memiliki payung hukum terapan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas memberikan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan, termasuk pula pencemaran udara. Karena itu, sudah semestinya pula Pemda memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), peraturan walikota (Perwali), atau peraturan bupati (Perbup) yang bisa digunakan untuk menindak pelaku pencemaran lingkungan, khususnya udara.

Selain penegakan hukum, langkah lainnya dalam menjamin kualitas udara dan lingkungan yang bersih adalah melibatkan masyarakat sipil. Dengan demikian, Pemda juga dituntut untuk menjaring aspirasi masyarakat dan mengelaborasinya bersama menjadi sebuah kebijakan. Adapun saat ini di beberapa kota telah terlihat adanya upaya Pemda dalam menghadirkan kualitas udara yang baik. Salah satu bentuknya ialah pembangunan jalur sepeda.

Di Jakarta, pembangunan jalur sepeda cukup masif. Kini output yang dihasilkan ialah jalur sepeda yang panjangnya mencapai 114,5 km. Jalur itu membentang di keseluruhan wilayah Jakarta. Dibangunnya jalur sepeda di Jakarta pun turut menginspirasi pembangunan jalur sepeda di kota-kota lainnya.

Dalam pembangunan jalur sepeda itu sedianya Pemda bisa mengajak masyarakat sipil berpartisipasi dalam penentuan. Diharapkan dengan adanya kebijakan yang partisipatif lewat pembangunan jalur sepeda, masyarakat lebih termotivasi menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari yang ramah lingkungan.

Tentunya masih banyak ragam kebijakan partisipatif selain penegakan hukum yang bisa diinisiasi Pemda bersama masyarakat sipil dalam menangani pencemaran udara. Dengan demikian, HAM warga untuk hidup sehat dengan menghirup udara yang bersih tak lagi sekadar angan-angan, tetapi menjadi kenyataan yang bisa dinikmati dan dirasakan langsung manfaatnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Sumber <https://www.infid.org/join/action/read/peran-pemda-dalam-menjamin-hak-warga-menghirup-udara-bersih>



DISKUSI ONLINE LIVE

Instagram Story @infobakti



Videoge: Creative Hub Anak Muda Labuan Bajo

Videoge sebagai “Laboratorium Kreativitas” dalam reproduksi dan pengarsipan pengetahuan lokal melalui kerja kolektif berbasis kewargaan.

Bagaimana Videoge hadir merekam dinamika pengetahuan warga dan kota Labuan Bajo di tengah geliat sektor pariwisata?



Karena Pembangunan Punya Ruang untuk Semua

Dinna Noach Sehari-hari bekerja sebagai staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Disabilitas, membantu pemerintah dalam setiap proses pembangunan menjadi lebih inklusif.

Bagaimana pemenuhan hak dan keterwakilan teman disabilitas dalam pembangunan di NTT dapat terwujud?

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Pendidikan Dari dan Untuk Anak Negeri

Ahmad Junaedi, seorang dosen pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, PhD Candidate di Monash University. Selain aktif sebagai pengajar. Bang Junet, sapaan akrab Ahmad Junaidi juga *founder* dari Yayasan Jage Kastare Lombok. Sebuah komunitas pendidikan alternatif yang fokus memberikan edukasi, literasi pentingnya akses pendidikan bagi pendidikan anak di Lombok. Sebuah pusa t pembelajaran pemuda yang digerakkan oleh sukarelawan yang bekerja di bidang pendidikan, nutrisi dan kewirausahaan sosial di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bertujuan untuk mengembangkan potensi remaja dan anak-anak di Lombok, meningkatkan kualitas pembelajaran puluhan peserta didik di Pulau Lombok.



Noken Adat untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat

Noken Adat adalah ebuah Social enterprise yang mengembangkan jasa pendampingan masyarakat adat untuk membantu menghubungkan masyarakat adat dengan mitra Noken Adat yaitu dari LSM, Tokoh UMKM , *Influencer*, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait aturan adat , perizinan adat , pelatihan umkm , atau yang lainnya yang berhubungan dengan kearifan lokal dengan cara pendekatan langsung ke tokoh masyarakat adat dan juga ke calon mitra noken adat yang nantinya akan ter-realisasi juga dalam bentuk *platform (website, mobile)* Noken Adat.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Stereotip Gender dan Subordinasi terhadap Kepemimpinan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perempuan” berasal dari kata “empu”. Dalam Bahasa Jawa Kuno, yang kemudian diserap dalam Bahasa Melayu, yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan “per-” dan “-an” yang kemudian membentuk “perempuan”.

Dalam Bahasa Jawa, perempuan disebut wadon alias wadahe adon-adon, yang memiliki arti tempat dibentuknya sesuatu. Perempuan secara biologis bermakna orang yang mengalami menstruasi, memiliki rahim, hamil dan menyusui. Dengan pembawaan alaminya, pengalaman reproduksi perempuan sudah demikian kompleks dan bermacam rupa.

- <https://batukarinfo.com/komunitas/articles/stereotip-gender-dan-subordinasi-terhadap-kepemimpinan-perempuan>

Publikasi Terbaru



Pendes Responsif, Aset Inklusif, dan Warga Aktif

Buku ini merupakan hasil dokumentasi pelajaran berharga (lessons learned) implementasi Program *Consortium for Inclusive Village* (CIV). Program yang didukung VOICE—a *Consortium between Oxfam, Novib and HIVOS*—ini berupaya mewujudkan tata kelola pemanfaatan aset desa yang lebih inklusif dan partisipatif, guna meningkatkan akses ekonomi dan perlindungan kelompok rentan dan marginal di 4 desa sasaran. Kelompok rentan yang dimaksud, yakni warga perempuan di desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset desa. Sedangkan kelompok marginal yang disasar adalah para penyandang disabilitas (juga perempuan yang memiliki anak penyandang disabilitas), dan warga miskin. Lebih spesifik lagi, kelompok rentan dan marginal yang diprioritaskan dalam program advokasi ini adalah keluarga-keluarga yang memiliki “interseksi kerentanan dan marginalisasi”. Mereka antara lain; rumah tangga miskin, perempuan sebagai kepala rumah tangga, dan rumah tangga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan lansia.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/menata-kelola-data-demi-pelayanan-publik-studi-kasus-tata-kelola-data-sektor-kesehatan-dan>

Berita Terbaru

Menilik Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di Tahun 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis hasil pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2022. Terjadi peningkatan skor IPM pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2021.

IPM menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara secara komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi. Adapun pengukuran IPM di Indonesia menggunakan 3 dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

- <https://batukarinfo.com/news/menilik-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-di-tahun-2022>